IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

Juwita

IAIN Parepare

juwita@iainparepare.ac.id

Hannani

IAIN Parepare

hannani@iainparepare.ac.id

Arqam

IAIN Parepare

wahidin@iainparepare.ac.id

Abstract

Nowadays, a boarding house business is very much in demand by the community because the benefits of a boarding house business are very promising especially in areas close to tertiary institutions. It's just that often the boarding house owner forgets about his obligation to pay zakat and tax from the rental of his boarding house. This study aims to determine how the implementation and its challenge of zakat and boarding house tax in Bukit Harapan Village, Soreang District, Parepare City

This study uses a qualitative descriptive approach and obtains data from primary and secondary data. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is qualitative data.

The results of this study indicate that the implementation of zakat and boarding house tax is that the boarding house owner has not fully issued the zakat and paid the boarding house tax because there are some obstacles that make the implementation not implemented properly.

Keywords: *Implementation, Zakat, Tax, Dormitory School*

Abstrak

Sekarang ini bisnis atau usaha rumah kos sangat diminati masyarakat karena keuntungan dari bisnis rumah kos sangat menjanjikan terlebih lagi di wilayah yang dekat dengan Perguruan Tinggi karena lokasi yang dekat dengan Perguruan Tinggi memiliki prospek yang lebih baik. Hanya saja seringkali pemilik rumah kos melupakan kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak dari hasil penyewaan rumah kosnya. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui bagaimana implementasi dan hambatan terlaksananya zakat dan pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari zakat dan pajak rumah kos adalah pemilik rumah kos belum sepenuhnya mengeluarkan zakat dan membayar pajak rumah kosnya dikarenakan ada beberapa hambatan-hambatan yang membuat implementasi tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: *Implementasi, Zakat, Pajak, Rumah Kos*

A. Pendahuluan

Islam adalah syariat yang Allah berikan kepada manusia untuk mengatur kehidupannya sebagai bagian dari semesta ini yang diciptakan dan diatur oleh Allah swt. Hal ini berarti ketaatan pada syariat merupakan kebutuhan manusia sehingga kehidupan mereka menjadi harmonis di tengah ketenangan alam semesta¹.

Manusia diciptakan sebagai makhluk individu yang saling membutuhkan individu lainnya. Manusia bisa menjalin hubungan atau pergaulan antara sesama manusia dengan cara muamalah. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik. Ruang lingkup muamalah yaitu membahas masalah jual beli, gadai, sewa-menyewa, jaminan dan tanggungan, dan sebagainya². Kajian ini akan membahas mengenai sewa-menyewa atau lebih tepatnya usaha sewa-menyewa rumah kos.

Sekarang ini bisnis atau usaha rumah kos sangat diminati masyarakat karena keuntungan dari bisnis rumah kos sangat menjanjikan. Bisnis ini memiliki prospek yang lebih baik apabila lokasinya yang dekat dengan Perguruan Tinggi, seperti kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan kampus Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR) ini sangat strategis dijadikan tempat usaha rumah kos. Banyak mahasiswa/pelajar yang berasal dari daerah-daerah lain yang menempuh pendidikan sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sewa-menyewa tersebut. Tetapi seringkali masyarakat melupakan kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak dari hasil penyewaan rumah kos.

Zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam, yang pertama dan kedua adalah syahadat dan shalat. Al-Qur'an menjadikan hal ini sangat penting walaupun dalam bayangan masyarakat pada umumnya puasa menempati kedudukan setelah shalat. Shalat dan zakat adalah bangunan Islam. Jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa bertahan. Zakat dihubungkan dengan shalat sebanyak delapan puluh dua kali dalam al-Qur'an. Diantaranya:

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110.

*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*³.

Zakat merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah swt., dan dapat menyucikan harta seseorang, karena dalam harta seseorang ada hak orang lain. Jika hak tersebut tidak dikeluarkan, ia akan menjadi virus yang akan menggerogoti harta, sehingga zakat bertujuan membersihkan harta dari hak orang lain.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 103.

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 2.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 5.

³Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 17.

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka*⁴.

Ada sekian banyak bentuk penghasilan saat ini tetapi belum dikenal pada masa Nabi Muhammad saw., dan tidak ada ketetapannya, salah satunya adalah zakat rumah kos. Banyak yang beranggapan apabila tidak ada ketetapannya maka tidak boleh dipungut darinya pungutan apapun itu tanpa hak, termasuk zakat. Akan tetapi, bila pendapat itu diikuti, maka akan terasa ketidakadilan. Ketidakadilan itu karena dapat dibayangkan petani berpenghasilan kecil dikenakan zakat, sedangkan pemilik saham dan gedung-gedung yang disewakan tidak dikenai zakat meskipun sedikit, padahal bisa jadi penghasilan mereka lebih tinggi dari pada seorang petani. Berkaitan dengan hal ini, banyak ulama yang menetapkan bahwa pada prinsipnya, penghasilan apa pun yang diperoleh dan dengan cara apapun yang dibenarkan agama harus dizakati.

Tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara pada awal masa pemerintahan Islam⁵. Hal itu dapat dilihat dari sejak diwajibkannya zakat kepada Muslimin hingga kejayaan pemerintahan Islam. Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi kewajiban negara, namun menjadi kewajiban individu Muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁶. Jadi masyarakat Muslim yang hidup di suatu negara mempunyai kewajiban lain yang harus di bayar, yaitu selain membayar zakat sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam ia juga diwajibkan membayar pajak sebagai bukti ketaatan kepada negara. Hal ini terlihat jelas di dalam al-Qur'an dan Undang-undang dengan adanya dua kewajiban yang berbeda, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw dan prosedur pengelolaannya terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan kewajiban membayar pajak terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)⁷. Serta yang lebih jelasnya lagi mengenai pajak rumah kos yang ada di daerah kota Parepare, yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.⁸ Dengan berjalannya zakat dan pajak yang sesuai dengan syariah, diharapkan akan dapat menggugah para Muzaki dan Wajib Pajak, untuk menunaikan keduanya dengan sungguh-sungguh.

Warga negara mempunyai dua kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat atas investasi yaitu zakat hasil usaha rumah kos bagi umat Islam dan membayar pajak penghasilan bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

B. Diskusi dan Pembahasan

1. Gambaran Umum dan Profil Penelitian

Mayoritas penduduk Kecamatan Bukit Harapan adalah beragama Islam dengan jumlah penduduk laki-laki 4.480 orang dan penduduk perempuan sebesar 4.192 orang, sedangkan yang beragama Kristen jumlah penduduk laki-lakinya hanya sebesar 287 orang dan penduduk perempuannya sebesar 311

⁴Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

⁵Masjufuk Zuhdi, *Maqail Fiqhiyah* (Cet. IX; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), h. 226.

⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 25-27.

⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syaria*, h. 8.

⁸Walikota Parepare, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel," http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_PARE%20PARE_13_2011.pdf. (10 Januari 2017).

orang. Sehingga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat tentang pola hidup dan adat istiadat yang berkembang dalam lingkungan masyarakat di Kelurahan Bukit Harapan⁹.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan lokasi penelitian di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare karena di daerah ini terdapat beberapa perguruan tinggi baik itu Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR). Mahasiswa STAIN Parepare dan UMPAR yang berasal dari luar daerah Parepare maupun didaerah Parepare itu sendiri yang jauh dari tempat perkuliahan pasti membutuhkan tempat tinggal sementara yang dekat dari kampus. Sehingga masyarakat di Kelurahan Bukit Harapan yang ada di dekat kampus maupun jauh dari kampus memilih untuk membangun kos-kosan di dalam lingkup perguruan tinggi untuk di sewakan sebagai tempat tinggal sementara bagi mahasiswa, karena ini adalah peluang besar untuk masyarakat mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Tetapi sering kali masyarakat lupa bahwa penghasilannya dari rumah kos ada hak orang lain, selain sebagian penghasilannya itu harus di salurkan melalui zakat bagi umat Islam juga melalui pajak bagi seluruh penduduk Indonesia apabila sudah memenuhi syarat.

2. Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan Zakat Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

Zakat dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidak sekedar kata-kata melainkan dengan iman harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah swt. Pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cintanya, bukan dari motif lain. Hadis yang merupakan sumber kedua dalam Islam menguatkan al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja. Tetapi, zakat merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah swt.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah baik secara umum ataupun khusus sehingga telah di ketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat maka ia dianggap kafir. Meskipun ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hanya berlaku di akhirat nanti dan acaman itu belum ada di berlakukan di negara Indonesia tetapi umat Islam harus menyadari bahwa dengan mengeluarkan zakat masyarakat sudah banyak membantu orang-orang yang membutuhkannya. Jadi zakat menuntun masyarakat untuk peduli kepada sesama manusia, karena zakat berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial akan nilai kemanusiaan dan mendorong produktivitas ekonomi, zakat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat itu untuk mendekatkan dan meningkatkan ketaatan masyarakat kepada Allah.

Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk mengurangi kemiskinan. Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah swt., yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad saw., yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh¹⁰.

⁹Kantor Kelurahan Bukit Harapan, data diambil dari Dokumen Kelurahan Bukit Harapan, (15 Maret 2017).

¹⁰Ali Hasan, Masail Fihyah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2.

a. Implementasi Zakat Rumah Kos

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Pemilik rumah kos sangat antusias dalam mengeluarkan zakat rumah kos meskipun mereka belum memahami mengenai syarat dan tata cara mengeluarkan zakatnya, hal ini dilihat dari beberapa tanggapan pemilik rumah kos saat di wawancara:

Wiatim (Pemilik Kos/Wisma Mama Rina), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah 5 tahun menjalankan usaha rumah kos, ada 20 kamar, sistem pembayarannya macam-macam, ada perbulan teresah anak-anak, ada mau perbulan boleh, dua bulan, satu tahun, tapi yang jelas kalau satu tahun pasti saya kasi diskon Rp.3.300.000,- saja, kalau perbulan Rp.325.000,-. Jenis zakat yang biasa dikeluarkan zakat mal seperti zakat profesi, zakat fitrah, kalau dari hasil rumah kos zakat hartakan itu, setiap tahun saya keluarkan itu, saya bawa ke panti asuhan, misalnya satu tahun Rp.50.000.000,- saya dapat, saya keluarkan 2,5% dari Rp.50.000.000,- jadi saya kasi keluar Rp.1.250.000,-, saya bawa ke panti asuhan karena saya lebih senang langsung sama yang bersangkutan, saya kasi dalam bentuk uang¹¹”

Hj. Marwati (Pemilik Kos/ (pondok tidak ada namanya)), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Kalau yang berkembang sekarang ini ini sudah 3 tahun, kalau kamarnya 26 kamar. Sistem pembayarannya kalau saya pertahun, ada juga dua kali, saya kasi keringanan anak-anak, umpama dia satu orang dia mau satu kamar to jadi saya kasi bayar dua kali, jadi dia agak ringan kasihan, kalau satu kamar Rp.3.500.000,- dengan air mie itu. Kalau zakat ini kos, saya cuma hitung hasilnya, biasa cuma kasi makan di panti, biasa di Panti Ansanurla, di Panti Hidayatullah, dalam bentuk makanan, kadang sebagian uang, saya cuma hitung katanyakan seumpama Rp.10.000.000,- keluar Rp.250.000,- to, saya cuma hitung begitu langsung sekali setahun lah kalau bulan puasa, atau kadang saya pabuka begitu. Saya keluarkan zakat karena ditahu mi oh bagus mi kalau begini ki, sudah mengerti mi ki bilang harus kita keluarkan zakatnya, itukan bukan kita punya hak, ada haknya orang bukan hak kita semua¹².”

A.Resky Hidayat. HD (pengelola Kos/Pondok Azizah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sudah 5 tahun. Ada 6 kamar di atas dan di bawah ada 11 kamar jadi totalnya semua ada 17 kamar. Sistem pembayaran yang di lakukan yaitu uangnya di terima di awal masuk, kalau mau di lanjut dibayar 3 bulan sebelum habis masa kontrakannya. Di atas harganya Rp.2.500.000,- kalau yang di bawa tiga kamar yang wc dalam Rp.3.500.000,- dan yang di bawa yang tidak wc dalam Rp.2.500.000,-. Mengenai zakat tahu, jenis zakat yang biasa di bayar zakat mal yaitu zakat penghasilan, zakat profesi, disinikan saya cuma sebagai pengelola yang tahu pemiliknya to, pemiliknya itu menyatukan semua harta profesinya to baru di keluarkan hartanya, kita belikan sembako. Kita setiap tahun itu mengeluarkan zakat sedekahnya berbagi ke orang tidak mampu, kita ada paket-paket, perpaket itu isinya Rp.100.000,-, kita biasa bagi 100 paket, begitu caranya kita mengeluarkan sedekahnya setiap tahun, diberikan di mesjid Aradia dekat pasantren di Ablam. Kami belum memilih BAZNAS karena lebih percaya saja kalau pihak mesjid yang mengelola, kalau BAZNAS agak repot ya, kalau mesjidkan dekat dari rumah, lebih cepat, lebih percaya karena selain di tahu, di kenal, juga jelas mesjid.¹³”

¹¹Wiatim, Pemilik Rumah Kos Wisma Mama Rina, di kel.Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di BTN. Pantai Indah Soreang, 28 Maret 2017.

¹²Hj. Marwati, Pemilik Rumah Kos tanpa nama, di kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KM. Baru, 30 Maret 2017.

¹³A. Resky Hidayat. HD, Pemilik Rumah Kos Azizah, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Abu Bakar Lambugo, 03 April 2017.

Hj. Nurhidayah (Pemilik Kos/Pondok Annur), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah menjalankan usaha rumah kos sejak tahun 1995, jadi sudah sekitar 22 tahu. Ada 20 kamar tapi 5 orang yang punya, anak ku 4 dan saya sendiri, biaya pembayarannya perbulan Rp.300.000,- termasuk lampu dan air mi dan pertahun di bayar Rp.2.500.000,- di luar air dan lampu. Kalau zakatnya ini kos saya biasanya kasih masuk di Panti Asuhan Rahmad, kasi keponakan saya juga, kasi keluarga saya yang tidak mampu. Saya kasi seperti indomie beberapa kotak, kadang saya lebih yakin di Panti Asuhan, saya belum tahu itu yang lain (LAZ dan BAZNAS) ¹⁴.”

Muh. Yamin (Pemilik Kos/Pondok Kuning), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah 10 tahun itu yang 7 kamar tetapi yang 9 kamar baru ini tahun dikasi kontrak. Ada 16 kamar, sistem pembayaran pertahun, kalau yang 7 kamar harganya Rp.4.000.000,- satu tahun, yang 9 kamar harganya Rp.3.500.000,- pertahun diluar listrik dengan air, mereka bayar air Rp.500.000,- lebih satu bulan semua, kalau listrik lebih Rp.1.000.000,-. Hasil dari rumah kos zakat harta itu, saya kasi saja di mesjid, kalau anak-anak cepat membayar saya kasi 2% dari jumlahnya itu, dalam bentuk uang, saya tidak bisa sebutkan berapa jumlah zakat yang saya ka keluar karena kalau saya kasih keluar zakatnya itu saya cuma kasi keluar tidak bilang-bilang sama orang-orang¹⁵”

LA.Ramli (Pemilik Kos/pondok Madinah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Menjalankan usaha rumah kos sekitar 4 tahun. Ada 25 kamar semua dari 3 pondok Madina. Sistem pembayarannya pertahun, biayanya yang harus dibayar sebesar Rp.2.000.000,- pertahun. Kalau saya tidak mengerti masalah zakat, saya mengeluarkan zakat artinya zakat kos disamping setiap hari jumat, kan saya keluarkan juga zakat di mesjid Rp.160.000,- perbulan jadi hampir Rp.2.000.000,- pertahun. Zakat saya kasi keluar sebesar Rp.1.500.000,- pertahun. Saya cuma mau kasi keluar, Rp.1.500.000,- pertahun, itupun saya zakatkan di mesjid, dalam bentuk uang, di kasikan di mesjid di suppa, saya bangun mesjid juga disana, mesjid As sahid, mesjidnya belum jadi baru mau di cor baru pasang atap, lain dari penghasilan lain saya sumbangkan lagi kesana semacam kemarinkan saya sumbang lagi 15 trek timbunan. ¹⁶”

Ibu Norma (Pemilik Kos/pondok Sahabat), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sejak tahun 2011, sekitar 6 tahun, tetapi baru 2 tahun terakhir ini penuh atau rame. Ada 20 kamar, 9 kamar di atas, 11 kamar di bawah, kalau satu tahun Rp.2.000.000,- ada juga yang Rp.3.000.000,-, kebanyakan yang Rp.2.000.000,-, yang Rp.3.000.000,- cuma 4 kamar, yang membedahkan luasnya. Sebagian hasil dari rumah kos saya kasikan di mesjid, kakakku disana imam jadi saya bilang bagikan saja kepada yang membutuhkan, saya kasi dalam bentuk uang, biasanya Rp.1.000.000,- saya menghitungnya dari 1 tahunnya saya dapat. Saya tidak tahu menghitungnya zakat hasil rumah kos, saya cuma perkirahkan saja, karena kemarin dapat berapa dik, saya cuma dapat dari sawah sama bapaknya kemarin baru keluar zakatnya hampir Rp.1.000.000,-, saya kira-kira saja dari situ, bapaknya kerja di sawah juga dia bayar zakat juga dari hasil sawahnya, saya perkirakan dulu disitu, saya bilang berarti kalau dari kos ini sekitar begitu juga zakatnya. Saya keluarkan zakat di kampung karena saya lihat di kampung banyak yang butuh, kalau

¹⁴Hj. Nurhidayah, Pemilik Rumah Kos/pondok Annur, kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Laupe, 30 Maret 2017.

¹⁵Muh. Yamin, Pemilik Rumah Kos/Pondok Kuning, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di BTN Lapade Mas, 10 April 2017.

¹⁶LA. Ramli, Pemilik Rumah Kos/pondok Madinah, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di H. Laele, 30 Maret 2017.

disinikan bisa diberikan kepada yang tidak butuh to, maksudnya ada ji tapi kalau dikampung bisa lihat sendiri yang susahnyanya.¹⁷”

Implementasi dari zakat rumah kos khususnya rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu implementasi tidak terlaksana dengan baik dikarenakan pemilik rumah kos rata-rata tidak mengeluarkan zakat rumah kos tetapi mengeluarkan sedekah yang dianggapnya sebagai zakat dari rumah kosnya. Hal ini karena kurangnya pengetahuan sehingga pemilik rumah kos kurang memahami mengenai syarat-syarat dan perhitungan zakat rumah kos, dalam pemahaman pemilik rumah kos apabila sudah memberikan sebagian hartanya maka sudah bisa dikatakan mengeluarkan zakat, misalnya hasil dari usaha rumah kosnya langsung dibagi 2,5% tanpa melihat nishabnya apakah penghasilannya sudah cukup atau belum dan sebagian pemilik rumah kos tidak menghitung dengan benar jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, pemilik rumah kos hanya mengira-ngira dalam mengeluarkan zakat rumah kosnya. Sehingga masyarakat seringkali menyamakan zakat, infak dan sedekah. Kurangnya pemahaman mengenai zakat rumah kos, masyarakat berbeda-beda dalam mengeluarkan zakat, baik itu jumlah sampai tempat mengeluarkan zakat. Selain itu masih ada beberapa hambatan lain yang membuat implementasi zakat rumah kos tidak terlaksana dengan baik.

Masyarakat mengeluarkan zakat rumah kos masih menggunakan cara yang bersifat tradisional yaitu muzaki langsung memberikan zakatnya pada mustahik seperti fakir, miskin, anak yatim, dan di mesjid tanpa melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan alasan pemilik rumah kos tidak mengetahui adanya tempat pengelolaan zakat dan masih kurang percaya, serta menganggap sulit proses pembayaran zakat di BAZNAS atau tempat pengelolaan zakat lainnya. Cara ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, padahal fungsi BAZNAS sangat penting, yaitu sebagai suatu lembaga yang tujuannya untuk mengelolah zakat secara efisien.

b. Hambatan Pelaksanaan Zakat Rumah Kos

Hambatan adalah halangan atau rintangan¹⁸. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik suatu aturan, seperti halnya hambatan pelaksanaan zakat rumah kos. Hambatan dari zakat rumah kos yaitu kurangnya pemahaman pemilik kos mengenai zakat dan pemanfaatan zakat sehingga pemilik rumah kos tidak mengeluarkan zakat rumah kosnya, seperti yang dikatakan narasumber saat di wawancara:

Hj. Cenrana (Pemilik Kos/Pondok Idaman), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos kurang lebih 4 tahun, tidak bersamaan’i semua, yang di bawa tahun 2013 kalau yang di atas tahun 2014 manni, bertahap to. Ada 20 kamar. Sistem pembayaran yang dilakukan pertahun, baru-baru naik ini, dulu Rp.3.500.000,-, tambah ini sekarang Rp.4.000.000,- naik lagi Rp.4.500.000,-, Rp.4.500.000,- terakhir. Beda-beda yang paling murah sekarang ini Rp.4.000.000,- dan yang paling mahal Rp.4.500.000,- sama mi sama uang lampu dan air. Kalau rumah kos belum, belum pernah mengitung, kalau misalnya pergi lagi ke kampung ada acara dikasi lagi anak-anak tak Rp.50.000,- nya, cuma zakat-zakat biasa ji mungkin begitu di’ apa tidak ku hitung’i karena baruka juga tahu bilang ada pale zakatnya itu kos¹⁹.”

¹⁷Norma, Pemilik Rumah Kos/pondok Laupe, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Laupe, 17 April 2017.

¹⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed III (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 385.

¹⁹Hj. Cenderah, Pemilik Rumah Kos/pondok Idanan, kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Jend. A. Yani, 11 April 2017.

Menurut Nana Sudjana dalam bukunya yang berjudul *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Winkel dan Mukhtar berpendapat bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencakup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain²⁰.

Pemahaman ialah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu, tahu dan dapat memberikan penjelasan dengan caranya sendiri dari apa yang telah di dapatkannya. Tanpa adanya pemahaman seseorang tidak akan mau menaati sebuah aturan yang ada, sama halnya dengan ibu Cendrana yang mempunyai penghasilan rumah kos yang cukup besar tetapi karena dia tidak tahu atau tidak paham mengenai zakat rumah kos, ibu Cendrana tidak mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kosnya karena dia tidak mengetahui mengenai zakat rumah kos dan tata cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya. Jadi salah satu yang menjadi hambatan dari rendahnya jumlah kaum muslim yang membayar zakat yaitu disebabkan oleh ketidak pahaman mengenai zakat itu sendiri.

Selain karena ketidak pahaman mengenai zakat, faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan zakat yaitu tidak adanya kesadaran diri pemilik rumah kos terhadap zakat.

Nurhayati (Pemilik Kos/Pondok An nur), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Rumah kos sudah 4 tahun, kecil-kecil jie kamarnya, yang di atas itu ada 26 kamar, yang di bawah ada 21 kamar, berarti 47 kamar. Sistem pembayaran pertahun ada perbulan, rata-rata pertahun, yang di atas Rp.1.500.000,- pertahun dan di bawah Rp.1.200.000,- pertahun. Zakat rumah kos itukan sama mi dengan zakat harta itu to, yang jelas saya hanya tahu itu zakat harta kan namanya kalau begitu rumah kos, kan sama juga dengan harta ceritanya to, sama dengan ini (jualan) zakat harta juga namanya kan penghasilan juga to, yang jelas yang saya tahu itu kalau dapat uang bisa di kasi keluar 2,5% infaknya, itu saja yang saya tahu. Belum pernah keluar, masalahnya kan saya masi terlilit utang, sedangkan saya mau dibantu, karena masi ada utangku 3 tahun, itu mi saya tidak kasi keluar karena begitu mi, itu mi katanya kita tidak bisa kasi keluar zakatnya karena begitu mi, kalau saya tidak bisa bayar’i utangku, tidak tahu apakah kelanjutannya itu melayang saya punya kos atau bagaimana, kecuali kalau sudah mampu, mungkin kalau selesai mie, tidak ada mi utangku bisa mi dikasi keluar zakatnya, sedangkan saya haji ini belumpi, itu mi saya tidak bisa kasi keluar zakatnya itu kos ku.”²¹

Dalam al-Qur’an, kewajiban mendirikan shalat disandingkan dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Seharusnya kesadaran umat Islam dalam menegakkan shalat beriringan dengan menunaikan zakat, tetapi hal inilah yang kurang terlihat pada umat Islam sekarang padahal manfaat zakat sudah diberikan oleh Allah kepada orang yang mengeluarkan zakat dan akan diberikan ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat, namun hal ini tidak akan memiliki arti apa-apa apabila orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tidak memiliki kesadaran diri. Zakat merupakan aturan dari Allah swt., untuk umat Islam dan sanksi atau hukumannya akan diterima kelak di akhirat, sehingga beberapa umat Islam mengabaikannya karena tidak langsung terkena sanksi tersebut, seperti halnya ibu Nurhayati dia mempunyai penghasilan kurang lebih mencapai Rp. 64.200.000,- pertahun dan dia mengerti dan tahu mengenai zakat rumah kos tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya dengan alasan masih mempunyai utang di Bank. Hal itu dikarenakan tidak adanya kesadaran diri dari ibu Nurhayati untuk mengeluarkan zakat dari sebagian penghasilannya.

²⁰Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h.24.

²¹Nurhayati, Pemilik Rumah Kos/pondok An nur, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Lahalede, 11 April 2017.

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan zakat dari hasil penyewaan rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yaitu:

Pertama disebabkan karena pemilik rumah kos tidak paham atau tidak tahu mengenai zakat rumah kos dan kedua karena tidak adanya kesadaran diri pemilik rumah kos untuk membayar zakat dari hasil penyewaan rumah kosnya.

3. Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

a. Implementasi Pajak Rumah Kos

Rumah kos/ indekos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan imbalan dalam jumlah tertentu. Atas penghasilan dari penyewaan rumah kos tersebut, maka pemilik rumah kos dikenakan pajak rumah kos di atur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Setelah diteliti ada beberapa yang taat membayar pajak rumah kos meskipun masih banyak keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos mengenai peraturan daerah yang menyamakan pajak hotel dengan pajak rumah kos seperti:

Wiatim (Pemilik Kos/Wisma Mama Rina), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Kalau yang berkembang sekarang ini ini sudah 3 tahun. Ada 20 kamar, sistem pembayarannya macam-macam, ada perbulan terserah anak-anak, ada mau perbulan boleh, dua bulan, satu tahun, tapi yang jelas kalau satu tahun pasti saya kasi diskon Rp.3.300.000,- saja, kalau perbulan Rp.325.000,-. Saya bayar pajak juga setiap bulan, kan kalau pajak sudah umum, kita nonton televisi hari-hari, saya tahu dari kecil, orang tua saya itu orang taat wajib pajak, trus pas saya bikin rumah kos itu langsung ada tagihannya dari dinas pendapatan daerah, tapi tidak semua rumah kos membayar dek, saya itu mungkin yang rajin, setiap bulan datang dia ambil uang di kos uang pajaknya, itu disebelah-sebelah itu tidak ada yang bayar, saya setiap bulan bayar, kalau tidak salah 10% pajaknya tetapi karena kita minta keringanan, kita minta keringanan dengan beberapa pertimbangan, kita dikasi keringanan. Sementara saya, misalnya sampai 20 kamar, lebih dari 10 kamar tidak terisi, misalnya anak-anak satu bulan dua bulan hilang tidak ada, bahkan sampai 5 bulan tidak membayar bagaimana, sementara satu kamar harganya cuma Rp.325.000,- perbulan, orang yang bikin di bawa 10 kamar Rp.700.000,- perbulan sudah berapa, kalkulasi pendapatan saya sama mereka jauh berbedah. Waktu ada rapat di DISPENDA masalah pajak begitu, saya bilang cocok memang saya punya kos ada 20 kamar, tetapi harganya berapa, tidak full juga, sementara orang bikin 9 kamar ada yang sampai Rp.1.000.000,- yang kelas-kelas melati itu, tidak seimbangkan, dengan pertimbangan seperti itu kita dikasi keringanan. Kita ini baru belajar, baru mau memulai usaha tetapi kiri kanan sudah macam-macam aturannya, sementara mereka yang bikin rumah kos yang besar-besar yang elit-elit endak dikenak pajak. Dari beberapa pertimbangan dikasi keringanan segini, jadi tetap hampir Rp.200.000,- setiap bulan, lain lagi PBB, kalau pajak bumi dan bangunan murah ji itu Rp.100.000,- pertahun dibayar jadi kita bayar ada dua pajak yaitu pajak PBB dan pajak kos²².”

Dra. Hj. Hasnani, M.Hum (Pemilik Kos/Pondok Kautsar), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sudah 7 tahun. Kamar sebanyak 12 kamar, sistem pembayarannya setiap tahun, pertahun di bayar Rp.2.000.000,- di luar air, air di bayar perbulan Rp.45.000,-. Kalau pajak rumah kos ini pernah ada petugasnya datang cek disini, bilang bagaimana ini ibu kos-kosnya berapa kamar, saya bilang 12, bulan depannya dikasi mi ka surat bilang haruski bayar, dulu itu dibayar Rp.70.000,- perbulan. Bapak ji selalu bayar dikantor yang dekat lapangan. Tidak semua juga itu

²²Wiatim, Pemilik Rumah Kos Wisma Mama Rina, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di BTN. Pantai Indah Soreang, 28 Maret 2017.

orang membayar to, saya itu selalu bayar sejak dibuka ini kos, sejak di bukanya ini kos 10 kamar memang lebih. Sebenarnya 10 kamar tapi hasilnya itu bukan untuk 10 kamar to karena kecil-kecil jadi bagaimana mi itu, tidak di tahu pemerintah itu, yang penting 10 kamar, jadi saya bilang biar mi. Menurut saya pajak ini masi perluh dibenahi, ditata dengan baik, itu juga aturan-aturannya masi perluh disosialisasikan kepada masyarakat, banyak yang tidak tahu kenapa saya harus bayar pajak, idealnya bagaimana itu. Maunya itu petugas tunjukkan Peraturan Daerahnya (PERDA)nya kekita. Kalau bapak itu selalu ji rajin membayar, saya ji itu pernah melawan karena berapa orang saya tanya tidak ada yang membayar, jadi saya bilang kenapa saya bodoh-bodoh mau membayar padahal banyak orang tidak membayar, alasannya macam-macam to. Terus saya tanya kepada petugas pajak bilang kenapa ada yang bayar ada juga tidak membayar, kata petugas pajak begitu mi bu kurang persunil. Tidak masuk akal to kalau begitu alasannya, sementara saya pernah terlambat disuratika, ada surat edaranku dari kejaksaan, langsung ada panggilanku, mungkin terlanjur terdata mi nama jadi susah mi mengelak, mestinya penghasilan yang dilihat jangan kamar, pengguna pajak yang membayar pajak ini ada ketidakadilan, misalnya seumpama Rp.30.000.000,- pertahun diterima ada di atasnya karena luas itu dia kamarnya, tidak banyak jumlahnya tapi luwas'i jadi harga sewanya sampai Rp.5.000.000,- atau Rp.6.000.000,- pertahun sementara saya dulu Rp.1.800.000,- ji dikena memangka pajak. Kalau pemerintah mau maksimal untuk menarik pajak dan adil juga, ya harusnya yang dilihat itu penghasilan sewanya bukan jumlah kamarnya, untuk pastikan berapa yang diterima oleh pemilik kos, petugas pajak bisa tanya dengan mahasiswa yang kos disitu berapa disewakan perbulan atau pertahun baru dikalikan dengan jumlah kamar²³.”

Norma (Pemilik Kos/Pondok Sanor), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Mungkin sekitar 4 tahun itu kos, jumlah kamar dulu 20 kamar tapi kos sekarang tinggal 14 karena ditempati anak saya satu lantai, sistem pembayarannya pertahun, ada setiap 6 bulan sekali, kalau perbulan sama saja Rp.3.000.000,- dibagi 12, kalau pembayaran kosnya mungkin saya yang terlalu termurah Rp.3.000.000,- pertahun, saya tanggung air dan lampu karena tidak mau susah selalu menagi. Kalau pajak ada pajak PBB yang tahunan ada juga pajak kos yang termasuk pajak hotel yang peraturan daerah sebesar Rp.100.000,- satu bulan. Setiap bulan langsung ada yang datang mencatat dan tidak pernah terlambat, karena memang saya kasi tahu petugas pajak bilang telponka kalau terlambat, itu sana hadiaku karena tidak pernah terlambat bayar pajak, ada bantal-bantal, ada kipas angin, satu kursi-kursi, dua bantal-bantal. Petugas pajak selalu datang mencek kalau sudah itu ada mi natempel diluar. Kiranya pajak kos itu masuk kelompok hotel, jadi saya bilang masa dikasi masuk kelompok hotel kos begitu, nabukan penginapan canggiro, kalau hotel berapa satu hari, kita bulan-bulan, iaro istilanya disukruki aga, ada mi itu kenangan rumah. Kos itu kamarnya cuma kamar kamar kecil sehingga banyak, jadi itu kalau kamarku cuma 2 meter lebarnya 3 meter panjangnya, untuk kafasitas dua anak jadikan biar sedikit uangnya bisato masewa, kemudian itu dibelakang rumah tidak nakena pajak apa tidak sampai 10 kamar padahal rumah besar dan mahal juga. Padahal itu kamarku kalau dijadikan kamar normal, kamarnormalkan 3x3, cuma 9. Tapi tidak enak juga kalau selalu dibuntuti terus jadi dibayar pajaknya. Seumpama harga kamar Rp.3.000.000,- pertahun dikalikan 14 kamar jadi Rp.42.000.000,- penghasilannya pertahun begitu ji nalihat petugas pajak, padahal hampir tiap malam ada lampu yang rusak, mana itu pompa air kalu rusak, berapa kali saya ganti itu pompa airku, kalau tidak bagus lagi anak-anak mengeluh lagi jadi tidak seindah yang dibayangkan, jadi tidak bisa dihitung sekian kamar sekian isi, tetapi perluh kamu teliti itu karena namanya penulisan to, banyak sekali orang sebenarnya itu akal-akalan dia tidak bayar, banyak itu disinikarena ada istilahnya itu kalau tidak sampai 10 kamar keatas tidak dikenak pajak, jadi dia

²³Hj. Hasnani, Pemilik Rumah Kos/pondok Al-Kausar, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Amal Bakti, 30 April 2017.

merasa tidak terkena pajak, banyak alasan misalnya disana nabikin sekian kamar saja, jadi sebenarnya banyak yang akal-akalan itu.”²⁴

Meskipun banyak keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos mengenai pajak rumah kos yang disamakan dengan pajak hotel, tetapi ada beberapa pemilik rumah kos tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat membayar pajak. Seperti Ibu Wiatim, Hj. Hasnani dan ibu Norma tetap membayar pajak dari hasil penyewaan rumah kosnya tetapi mereka mempunyai keluhan yang sama mengenai Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel. Pemilik rumah kos ini merasakan ketidakadilan saat rumah kos disamakan dengan pajak hotel karena penghasilan hotel lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan dari penyewaan rumah kos. Dilain sisi yang membuat pemilik rumah kos ini merasa tidak adanya keadilan dalam peraturan daerah ini adalah pemungutan pajak dilihat dari jumlah kamar bukan dari ukuran kamar dan bukan dari penghasilan rumah kos.

Ada juga pemilik rumah kos yang dengan sukarela menaati Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel, tanpa ada keluhan sama sekali, seperti :

Hj. Cenrana (Pemilik Kos/Pondok Idaman), saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos kurang lebih 4 tahun. Ada 20 kamar. Sistem pembayaran yang dilakukan pertahun beda-beda, yang paling murah sekarang ini Rp.4.000.000,- dan yang paling mahal Rp.4.500.000,- sama mie sama uang lampu dan air. Pajak yang saya bayar untuk rumah kos ini adalah pajak kos ini sendiri dan pajak bumi dan bangunan (PBB) juga. ia saya selalu bayar pajaknya, pajak kos itu yang pajak perbulan to yang Rp.100.000,-, yang termasuk pajak hotel. Kadang bapak kantornya bayar kadang juga di telpon bilang datangki saja ambil dirumah uangnya, setelah ditelpon petugas pajaknya datang kerumah ambil uangnya tapi ada ji stempelnya lengkap ji, ada ji buktinya dikasikanki. Alasan saya bayar pajak karena kalau kita bayar pajak sudah aman to, artinya sudah sesuai dengan aturan, kita tidak melanggar aturan yang ada²⁵.”

Pasangka (Pemilik Kos/Pondok Sakura), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah 4 tahun berjalan. Ada 17 kamar, sistem pembayaran yang digunakan ya terserah mereka mau bulan atau tahun boleh, tidak menentu, mereka juga kasihan karena dia bilang tidak mampu jadi terserah mereka. Harganya yang 12 kamar Rp.2.000.000,- pertahun dan yang 5 kamar harganya Rp.3.000.000, pertahun. Pajak rumah kos ada, saya tahu. Peraturan Daerah untuk kos-kosan termasuk perhotelan bulanan itu, kalau pajak tahunan itu PBB. Sejak ada peraturan sudah membayar memang pajak kos setiap bulanan. Ada bulanan ada tahunan, dua dikenai pajak yaitu pajak kos yang termasuk pajak hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saya tahu karena memang ketentuan pemerintah, saya taat, karena memang pegawai, jadi harus kita tahu peraturan. Saya biasanya lansungbayar ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), pajak dua-dua disana di bayar. Kalau pajak PBB disini Rp.50.000,- pertahun kalau pajak hotel rumah kos ini Rp.80.000,- perbulan, selambat-lambatnya dibayar tanggal 10, paling lambat diusahakan sampai tanggal 10 masuk tiap bulan, berarti Rp.900.000,- lebih satu tahun²⁶.”

²⁴Norma, Pemilik Rumah Kos/pondok Sanor, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Jend. A. Yani, 28 Maret 2017.

²⁵Hj. Cendera, Pemilik Rumah Kos/pondok Idanan, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Jend. A. Yani, 11 April 2017.

²⁶Pasangka, Pemilik Rumah Kos/pondok Sakura, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di BTN Berigai, 21 April 2017.

Ibu Cendrana dan bapak Pasangka dengan suka rela membayar pajak dari penghasilan rumah kosnya, mereka taat kepada aturan yang ada tanpa mengomentari aturan yang telah ditetapkan.

Mendengar dari pemilik rumah kos di atas saat diwawancarai, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi dari pajak rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, kurang terlaksana dengan baik karena masih banyak yang melanggar peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang dikategorikan juga dengan pajak rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 dengan cara tidak membayar pajak, dikarenakan adanya hambatan-hambatan sehingga pemilik rumah kos tidak membayar pajak. Meskipun ada beberapa yang membayar pajak rumah kos tetapi dengan rasa terpaksa, keterpaksaan itu dilihat dari keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos, salah satu keluhannya adalah pemilik rumah kos tidak setuju apabila pemungutan pajak di lihat dari jumlah kamarnya bukan penghasilan dari penyewaan rumah kos dan pemungutan pajaknya yang tidak merata.

b. Hambatan Pelaksanaan Pajak Rumah Kos

Realita pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Hambatan yang paling sering terjadi sehingga para wajib pajak tidak membayar pajak yaitu pemilik rumah kos melakukan perlawanan pasif, seperti sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. Pemahaman adalah salah satu syarat sehingga masyarakat mau membayar pajak, apa bila wajib pajak tidak memahami sistem perpajakan atau tata cara perpajakan bagaimana caranya para wajib pajak membayar pajak. Seperti halnya yang dikatakan:

Hj. Marwati (Pemilik Rumah Kos/Pondok (tidak ada namanya) saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Kalau yang berkembang sekarang ini 3 tahun, kalau kamarnya 26. Sistem pembayarannya kalau saya pertahun, ada juga dua kali, saya kasi keringanan anak-anak, seumpama dia satu orang dia mau satu kamar to jadi saya kasi bayar dua kali, jadi dia agak ringan kasihan, kalau satu kamar Rp.3.500.000,- dengan air mi itu. Saya tidak pernah kena pajak rumah kos mungkin sebagian kos ji yang kena, belum pernah memang didatangi, bagaimana saya mau membayar pajak, biasanya kalau membayar pajak ada surat edarannya begitu, ada blangko dikasi sama kita, makanya saya bingung mau keluaran pajak bagaimana caranya karena memang belum ada petugas pajaknya yang datang, itu makanya saya bertanya bagaimana itu pajaknya, dibayar dimana itu, saya bilang saya tidak bisa bayar kalau tidak ada blangko dari sana, nanti ada blangko dari sana baru kita bisa membayar kalau sudah ada begitu.”²⁷

Hj. Sumiati (Pemilik Kos/Pondok Faadiyah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Rumah kosku ini sudah 4 tahun. Kamar rumah kosku sebanyak 12 kamar, dengan sistem pembayaran kamar pertahun dan listrik perbulan perkepala, di bayar Rp.2.500.000,- pertahun dan listrik satu bulan Rp. 45.000,- perkepala. Biasa membayar pajak usaha ji ini (jualan), kalau pajak kos belum. ada ji saya dengar tapi belumpi sampai disini, katanya orang tergantung dari kamarkah atau apakah. Kalau di UMPAR kebanyakan orang disitu perbulan mi didapat sewa kosnya sementara bd di sini di STAIN kita masi pertahun di dapat to, otomatis memang itu perbulan kalau di dapat harus tomi kena pajak, inikan sistem pertahun jadi kalau misal Rp.30.000.000,- sewa kos 12 bulan, lalu di umpar Rp.5.000.000,- mie pertahun (kalau ada pertahun), kalau perbulan Rp.500.000,-. Kita disini Rp.30.000.000,- satu tahun mi itu. Mungkin begitu di dengar orang di kantor pajak to, jangan

²⁷Hj. Marwati, Pemilik Rumah Kos tanpa nama, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KM. Baru, 30 Maret 2017.

sampai itu si kasihan kebijaksanaannya, di sini to si orang masi pertahun dan murah-murah ji. Pernah jie dulu ada beberapa kos disurvei oleh ketua RT disini, didatangi rumah kos'e ditulis semua rumah-rumah kos, itu ji, tidak pernah orang-orang pajak langsung datang, belum pernah di suruh bayar pajak langsung. Bisa ji kita bayar pajak asal di kasiki fasilitas seperti lampu jalan, seandainya dikasiki pajak pertahun karena kitakan disini kasi sewa pertahun, seandainya mau pertahun ya bisa ji.²⁸”

Pak Ramli (Pemilik Kos/pondok Madinah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Menjalankan usaha rumah kos sekitar 4 tahun. Ada 25 kamar semua dari 3 pondok Madina. Sistem pembayarannya pertahun, biayanya yang harus dibayar sebesar Rp.2.000.000,- pertahun. Rumah kos disini belum kena pajak, belum ada yang bayar pajak hotel/rumah kos dan belum ada juga yang pernah datang dari pengawas pajak. Tapi akan di data ji juga semua nanti itu. Kalau disini belum pernah ada yang datang. Saya minta kemarin dari DISPENDA dekat lapangan Andi Makassar dibikinkan pajak untuk daerah, ini saya mau kenakan pajak daerah nanti supaya uangnya masuk ke daerah. Saya sudah tahu, tapikan kita belum di datangi, tapi ini kan saya sudah ajuhkan kemarin kebetulan di DISPENDA kemarin ada temanku²⁹.”

Penerapan pemungutan pajak rumah kos masih belum maksimal sehingga terjadi kendala yang timbul baik dari pihak internal (aparatur pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare) maupun dari pihak eksternal (pemilik rumah kos yang berada di kota Parepare). Kendala atau hambatan dari pihak internal yang didapatkan oleh peneliti di antaranya adalah sosialisasi dari pihak pajak belum maksimal, sehingga pemilik rumah kos sulit memahami sistem perpajakan yang ada, bahkan ada yang sampai tidak tahu mengenai aturan yang ada.

Hambatan selanjutnya juga terjadi bukan dikarenakan kemauan para wajib pajak tetapi aparat pemungut pajak itu sendiri, seperti sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Lemahnya pengawasan dalam penegakan hukum perpajakan mengakibatkan para wajib pajak kurang peduli terhadap pajak dan membuat hilangnya kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut berdasarkan pernyataan narasumber sebagai berikut:

Norma (Pemilik Rumah Kos/pondok Sahabat) saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sejak tahun 2011, sekitar 6 tahun, tetapi baru sekitar 2 tahun terakhir ini penuh atau rame. Ada 20 kamar, 9 kamar di atas, 11 kamar di bawa, kalau satu tahun Rp.2.000.000,- ada juga yang Rp.3.000.000,-, kebanyakan yang Rp.2.000.000,-, yang Rp.3.000.000,- cuma 4 kamar, yang membedahkan luasnya. Kalau pajak kos belum pernah saya bayar pajaknya, kalau pajak bangunannya (PBB) saya bayar kalau pajak kos belum. Pernah dulu disuruh rapat tapi kayaknya satu dua orang yang tinggal di kos, trus waktu rapat kalau endak salah dulu disitu 10% dari penghasilan tapi pas rapat belum selesai saya pulang diluwan. Dulu memang tidak ada orang, sekarang sudah ramai tidak pernah datang-datang petugas pajaknya, ya saya juga diam saja. Kenapa harus dipersamakan hotel di', padahal kita pertahun, perbulan, kalau hotelkan permalam, dari situ juga dulu saya keberatan to, banyak juga ibu kos yang keberatan karena kos disamakan hotel, kemudian kitakan modalnya banyak untuk membangun kos-kosan itu, maksudnya sekarang belum tentu tertutupi modal kita yang keluar³⁰.”

A. Resky Hidayat. HD (Pemilik Rumah Kos/pondok Azizah) saat wawancara mengatakan bahwa:

²⁸Hj. Sumiati, Pemilik Rumah Kos/pondok Faaduyah, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Amal Bakti, 3 April 2017.

²⁹LA. Ramli, Pemilik Rumah Kos/pondok Madina, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di H. Laele, Pada tanggal 30 Maret 2017.

³⁰Norma, Pemilik Rumah Kos/pondok Sahabat, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Laupe, 17 April 2017.

“Usaha rumah kos sudah 5 tahun. Ada 6 kamar diatas dan di bawa ada 11 kamar jadi totalnya semua ada 17 kamar. Sistem pembayaran yang di lakukan yaitu uangnya di terima di awal masuk, kalau mau di lanjut dibayar 3 bulan sebelum masa habis masa kontrakannya. Kalau di atas harganya Rp.2.500.000,- kalau yang di bawa tiga kamar yang wc dalam Rp.3.500.000,- dan kalau yang di bawa yang tidak wc dalam Rp.2.500.000,-. Kalau pajak kos belum pernah belum di laporkan, baru mau di laporkan karena baru tahun ini di tahu, ada ji pajak pembangunan, belum kos-kosan kita cuma bayar pajak tanah tanahnya (PBB), saya sudah tahu adanya pajak kos, tahu nya dari bapak-bapak kos semua, dari yang punya kos. Menurut saya sah-sah saja si karena kan kalau sudah 10 kamar keataskan itu sudah kaya penginapan, penghasilannya to sudah lumayan tinggilah. Setujuh-setujuh aja si saya tidak masalah lagipulakan kita harus keluarkan sedikit penghasilan kita, kitakan tidak boleh terlalu seraka seperti itu. Tetapi kos ini belum dilaporkan sehingga belum pernah di kenakan pajak³¹”

Muh. Yamin (Pemilik Rumah Kos/Pondok Kuning) saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah 10 tahun itu yang 7 kamar, tetapi yang 9 kamar baru ini tahun dikasi kontrak. Ada 16 kamar, sistem pembayaran pertahun, kalau yang 7 kamar harganya Rp.4.000.000,- satu tahun, yang 9 kamar harganya Rp.3.500.000,- pertahun diluar listrik dengan air, mereka bayar air Rp.500.000,- lebih satu bulan semua, kalau listrik lebih Rp.1.000.000,-. Semua rumah kos yang ada di Parepare saya yang pertama di tanya pajak rumah kos, saya tahu karena saya hadir rapat di walikota, kalau 9 kamar ke bawa tidak kena pajak kalau 10 kamar ke atas kena pajak, saya kasi tahu bigini pak kalau seperti hotel saya kira tidak mungkin sama karena saya punya kos tidak punya halaman seperti hotel, tidak punya parkir mobil, saya punya halaman hanya tempat jemuran. Saya dengar Rp.50.000.000,- pajak untuk rumah batu, tapi belum saya pergi lapor itu rumah kosku, sebenarnya saya kena mi itu karena baru ini tahun di tetapkan, tapi saya tidak pergi bayar, nanti tahun depan baru saya pergi lapor itu rumah kosku. ³²”

Ibu Sophia (Pemilik Rumah Kos/pondok Manalagi) saat di wawancarai mengatkan bahwa:

“Sudah 5 tahun ini kos-kosan. Jumlah kamar kosku ada 20 kamar, sistem pembayaran tahunan, harganya ada Rp.2.000.000,- ada juga Rp.2.500.000, yang di bawa ada 10 kamar pembayarannya Rp.2.500.000,-, yang di atas ada 10 kamar juga haranya Rp.2.500.000,-, belumpi kayaknya di periksa itu kosku, belum kena pajak itu, belum pernah datang dirumah, saya tidak tahu karena belum ada (Izin Mendirikan Bangunan) IMB nya itu kos-kosan, jadi nanti kalau terbit itu IMB kos-kosan baru bisa, maunya itu kumpulki dulu, musyawaraki dulu yang punya kos-kosan. ³³”

Nurhayati (Pemilik Rumah Kos/pondok An nur) saat wawancara mengatakan bahwa:

“Rumah kos sudah 4 tahun. Kecil-kecil ji kamarnya, yang di atas itu ada 26 kamar, yang di bawah ada 21 kamar, berarti 47 kamar. Sistem pembayaran pertahun ada perbulan, rata-rata pertahun, yang di atas Rp.1.500.000,- pertahun dan di bawa Rp.1.200.000,- pertahun. Kalau pajak dari kos belum dikenai pajak, pernah datang lihat daerah disitu tapi mungkin banyak naliat tidak sesuai to, kan dilihat kondisi kamarnya, kondisi kamar berapa terisi, pernah ada dari DISPENDA tapi naliat kondisi kamarku bilang tidak ada isinya, mungkin tidak ada tembusannya. ³⁴”

³¹Saudara A. Resky Hidayat. HD, Pemilik Rumah Kos/pondok Azizah, di kelurahan Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Abu Bakar Lambojo, 30 April 2017.

³²Muh. Yamin, Pemilik Rumah Kos/Pondok Kuning, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancarai oleh penulis di BTN Lapade Mas, 10 April 2017.

³³Sopia, Pemilik Rumah Kos/pondok Manalagi, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancarai oleh penulis di A. Yani lapadde, Pada tanggal 10 April 2017.

³⁴Nurhayati, Pemilik Rumah Kos/pondok An nur, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancarai oleh penulis di Lahalede, Pada tanggal 11 April 2017.

Di lihat dari hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa pemilik rumah kos belum mendaftarkan atau tidak melaporkan usaha rumah kosnya karena pengawasan yang kurang serta belum adanya tindakan yang tegas dari aparat yang membuat ketentuan sanksi yang ditetapkan untuk wajib pajak rumah kos yang tidak patuh masih lemah. Pemilik rumah kos tidak terlalu memperhatikan peraturan yang ada, serta hilangnya kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak.

Hambatan selanjutnya saat pemungutan pajak yaitu pemilik rumah kos melakukan perlawanan aktif dengan cara melalaikan pajak, seperti menggagalkan pemungutan pajak dengan memindah tangankan atas nama istri atau orang lain bukan karena keharusan. Agar tidak terkena pajak ibu Hj. Nurhidayah (Pemilik Kos/Pondok Annur), melakukan cara ini agar tidak dikenakan pajak. Hal ini berdasarkan pernyataan narasumber saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sejak tahun 1995, jadi sudah sekitar 22 tahun. Ada 20 kamar tapi 5 orang yang punya, anak ku 4 dan saya sendiri, biaya pembayarannya perbulan Rp.300.000,- termasuk lampu dan air mi dan pertahun di bayar Rp.2.500.000,- diluar air dan lampu. Berapa kali mi ada masalah, bahkan berapa kali mi dulu di panggil tentang kamar. Tahun lalu, pernah dikasi surat panggilan, pernah kita kumpul itu di depan kantor Satpol PP yang terletak di depan lapangan andi makassau, pernah kita di kumpul disana, berapa pulu orang yang punya rumah kos menghadiri dulu pada saat itu. Makanya disitu yang kena pajak 10 kamar keatas, saya juga sempat hadiri itu makanya saya tahu. Saya bilang saya ini 5 orang yang punya tapi pengelolaannya saya karena anak-anakku ini punya kesibukan juga semua, makanya saya tidak kena pajak, kalau tidak percaya boleh tanya tentangga saya berapa anakku, 4 anakku berarti 5 dengan saya. Tidak muhtlak kamar juga terisi semua, arahan pemerintah cuma lihat sekian pendapatan masyarakat padahal dia tidak tahu bagaimana mengurus rumah kos, bagaimana kondisinya kos, bagaimana apanya to³⁵.”

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber maka peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan pelaksanaan pajak dari hasil penyewaan rumah kos adalah:

Pertama sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. karena kurangnya sosialisasi dari aparat pajak. Kedua, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan mengakibatkan para wajib pajak kurang peduli terhadap pajak. Ketiga, pemilik rumah kos melakukan perlawanan aktif dengan cara melalaikan pajak, seperti menggagalkan pemungutan pajak dengan memindah tangankan atas nama istri atau orang lain bukan karena keharusan.

C. Kesimpulan

1. Implementasi dari zakat rumah kos khususnya rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu implementasinya tidak terlaksana dengan baik karena pemilik rumah kos tidak mengeluarkan zakat rumah kos tetapi mengeluarkan sedekah yang dianggapnya sebagai zakat dari rumah kosnya. Hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman dari pemilik rumah kos mengenai zakat rumah kos dan adapun hambatan pelaksanaan zakat adalah kurangnya pemahaman mengenai zakat rumah kos dan tidak adanya kesadaran diri dari pemilik rumah kos untuk membayar zakat rumah kosnya.
2. Implementasi dari pajak rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare kurang terlaksana dengan baik karena masih banyak yang melanggar peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang dikategorikan dengan pajak rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 dengan cara tidak membayar pajak karena adanya hambatan-hambatan sehingga pemilik rumah kos tidak membayar pajak. Hambatan pelaksanaan pajak dari penyewaan rumah kos disebabkan oleh sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan

³⁵Hj. Nurhidayah, Pemilik Rumah Kos/pondok Annur, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Laupe, 30 Maret 2017.

baik, dan sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. Serta pemilik kos melakukan perlawanan aktif dengan cara melalaikan pajak

Daftar Pustaka

- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.
- Al Asqalani. 2004. Ibnu Hajar. *Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqih Praktis Menurut Al-quran, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: penerbit mizan.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 1998. *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*. Bandung: Pustaka Madani.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 1997. *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*, diterjemahkan: Agus Effendi dan Bahrudin Fananny. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budiharto, Widodo. 2010. *Robotika Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta: Andi.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dapartemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya.
- Dokumen Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.
- Graffar, Afan. 2009. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syaria*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *The Power Of Zakat*. Malang: UIN Malang Press.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fihyiah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismawati, Esti. 2012. *Metode penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mardalis. 2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana. 2004. *Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia..
- PT Rajagrafindo Persada.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta :

- S, Valentina SRI– Aji Suryo. 2006.*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Shihab, M. Quraish. 2001.*Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*. Bandung: Mirzan Media Utama (MMU).
- Shomad, Abd. 2012.*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Putra Group..
- Subagyo, Joko. 2006.*Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sudjana, Nana. 1995.*Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2002.*Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulvianti, Vivi. 2015. "Sistem penyewaan rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare; perspektif Hukum Islam". Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanto, Bagong dan Surtinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2005. *Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).
- Zuhdi, Masjfuk. 1996. *Mazail Fiqhiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Internet

- [http://googleweblight.com/?lite_ur=http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html?m%3D1&ei=NERrUvK&Ic=id-ID&S=1&M=337&host=www.google.co.id&ts=1485171460&sig=AF9Nedn-iPhBumJ.A6fjkebaUJ-Ebb8nz-bQ. \(30 November 2016\).](http://googleweblight.com/?lite_ur=http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html?m%3D1&ei=NERrUvK&Ic=id-ID&S=1&M=337&host=www.google.co.id&ts=1485171460&sig=AF9Nedn-iPhBumJ.A6fjkebaUJ-Ebb8nz-bQ. (30 November 2016).)
- [http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.kostindekost.com/2016/05/09/kost-sewa-dan-kontrakan/&ei=Q81-Dihc&Ic=idID&S=1&m=337&host=www.google.co.id%ts=1484791461&sig=AF9Nedl9EzEKY9a5WUHee6GHfx4D8izCw. \(5 Desember 2016\).](http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.kostindekost.com/2016/05/09/kost-sewa-dan-kontrakan/&ei=Q81-Dihc&Ic=idID&S=1&m=337&host=www.google.co.id%ts=1484791461&sig=AF9Nedl9EzEKY9a5WUHee6GHfx4D8izCw. (5 Desember 2016).)
- [http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2009200078ARBab2/body.html. \(20 Desember 2016\).](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2009200078ARBab2/body.html. (20 Desember 2016).)
- Imam, Budiono. 2015. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumah Kost (Studi Kasus di Kelurahan Ngaliyan Kota Semarang)." Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Semarang. Eprints.walisongo.ac.id/5685/ (28 Agustus 2016).

- Setianty, Illona. 2012. *“Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Selama Tahun 2010 (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat).”* Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Depok : Jakarta.
<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j=&url=http://lib.ui.ac.id./file%3Ffile%3Dgital/20320024-S-Illona%2520Setianty.pdf&ved=0ahUKEwjSxK2zz4rVAhUHy8KHbVjBloQFggiMAA&usg=AFQjCNE2CpbH6Av16BHI.3C-Yc2hj50pVnQ> (28 Agustus 2016).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
<https://www.google.co.id/urld?sa=t&source=web&rct=j&url=http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-undang%2520No%252023%2520Tahun%25202011%2520tentang%2520Pengelolaan%2520Zakat.pdf&ved=0ahUKEwik1dj1-IrVAhWDrl8KHRsyAUMQFggiMAA&usg=AFQjCNHYaZHcY2P5YIIInkhLOk5GaPdjsNw> (26 Agustus 2016).
- Walikota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_PAREPARE%20PARE_13_2011.pdf. (10 Januari 2017).